

KUESIONER
(BIDAN PRAKTIK MANDIRI)

A. Identitas Responden

1. Keterangan Wawancara

a. Tanggal Pendataan :

b. Petugas Pendataan :

2. Identitas Responden

a. Nomor Responden

b. Jenis Kelamin : Perempuan

c. Alamat

d. Umur

Th

B. PERTANYAAN

(Ijin dan Persyaratan)

1. Kapan anda memulai praktik mandiri?
2. Anda lulusan darimana?
3. Berapa lama anda mulai sebagai Bidan Praktik Mandiri?
4. Pelayanan apa yang anda berikan dalam Bidan Praktik Mandiri?
5. Apa saja persyaratan yang diperlukan untuk mendirikan Bidan Praktik Mandiri?

6. Apakah anda melakukan pengobatan umum dalam Bidang Praktik Mandiri?
7. Apakah anda sudah pernah memperbaharui jjin?
8. Apakah ada rekomendasi dari IBI untuk mendapatkan jjin praktik mandiri?
9. Apakah pelaksanaan praktik bidang dilakukan pengawasan oleh organisasi profesi? Kapan?
10. Apakah bidang perlu meningkatkan pendidikannya untuk dapat menjalankan praktik sesuai dengan profesinya?
(Kewenangan)
(Kepmenkes No. 900/MENKES/SK/VII/2002)
Pelaksanaan Kepmenkes No.900/MENKES/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidang. Kewenangan bidang dalam Kepmenkes tersebut antara lain : pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan masyarakat.
11. Bagaimana menurut pendapat anda tentang kewenangan bidang dalam Kepmenkes No. 900/MENKES/SK/VII/2002?
12. Bagaimana pelaksanaan praktik bidang berdasarkan Kepmenkes No. 900/MENKES/SK/VII/2002?

(Permenkes No. HK. 02.02/MENKES/149/I/2010)

Pelaksanaan Permenkes No.HK.02.02/MENKES/149/2010 tentang jjin dan penyelenggaraan praktik bidang. Kewenangan bidang dalam Permenkes tersebut antara lain : pelayanan kebidanan, pelayanan

kesehatan reproduksi perempuan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam Permenkes ini kewenangan bidan mulai untuk dibatasi.

13. Bagaimana menurut pendapat anda tentang kewenangan bidan dalam Permenkes No. HK. 02.02/MENKES/149//2010?

14. Bagaimana pelaksanaan praktik bidan berdasarkan Permenkes No.

HK. 02.02/MENKES/149//2010?

(Permenkes No. 1464/MENKES/PER//2010)

Pelaksanaan Permenkes No.1464/MENKES/PER//2010 tentang jinn dan penyelenggaraan praktik bidan. Kewenangan bidan dalam Permenkes tersebut antara lain : pelayanan ibu, pelayanan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Dalam Permenkes ini bidan hanya dapat melakukan pelayanan imunisasi, dan keluarga berencana atas tugas pemerintah. Dan bidan hanya dapat memberikan konseling.

15. Bagaimana menurut pendapat anda tentang kewenangan bidan dalam Permenkes No. 1464/MENKES/PER//2010?

16. Bagaimana pelaksanaan praktik bidan berdasarkan Permenkes No. 1464/MENKES/PER//2010?

17. Bagaimanakah kewenangan bidan sebelum berlakunya Permenkes

No.1464/MENKES/PER//2010 dan sesudah berlakunya

Permenkes No. 1464/MENKES/PER//2010?

18. Apakah kewenangan bidan sudah sesuai dengan Permenkes No. 1464/MENKES/PER/2010?

19. Apakah bidan dalam menjalankan praktik sudah sesuai dengan Peraturan Menteri ini?

20. Bagaimanakah batasan praktik bidan setelah berlakunya Permenkes No. 1464/MENKES/PER/2010?



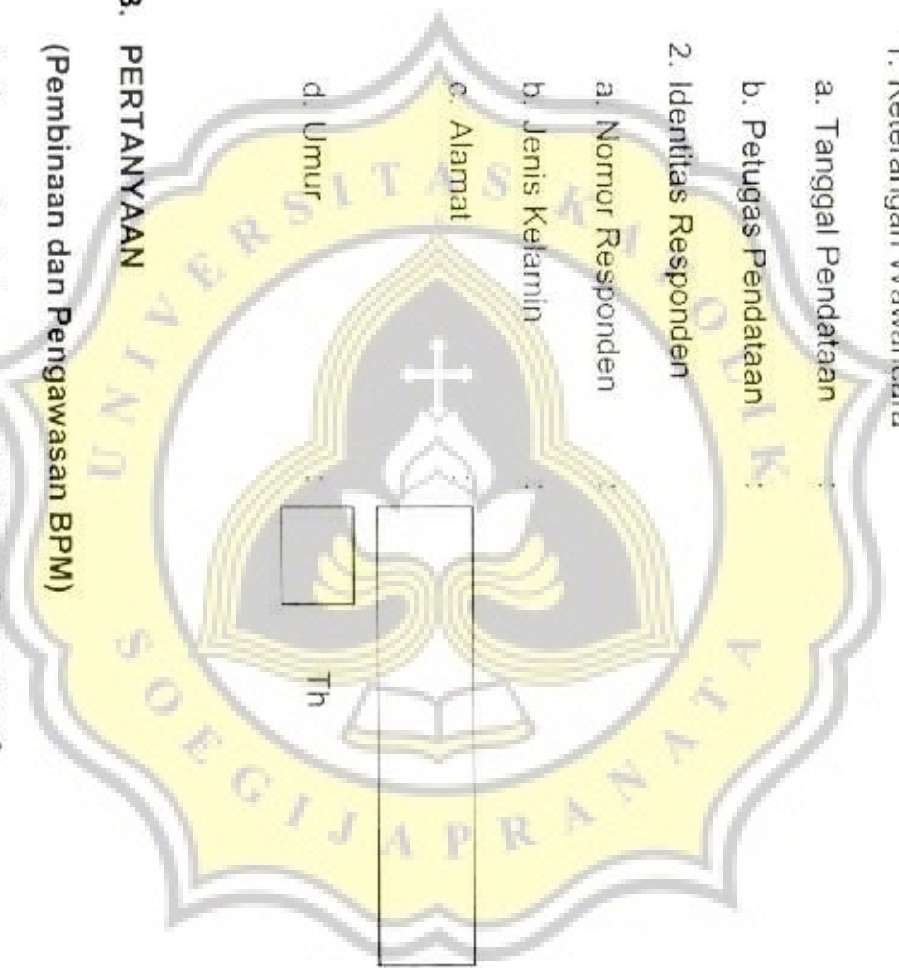
KUESIONER
(PENGURUS IBI)

A. Identitas Responden

1. Keterangan Wawancara
 - a. Tanggal Pendataan
 - b. Petugas Pendataan

2. Identitas Responden

- a. Nomor Responden
- b. Jenis Kelamin
- c. Alamat
- d. Umur



B. PERTANYAAN

(Pembinaan dan Pengawasan BPM)

1. Berapa jumlah anggota IBI di Kota Semarang?
2. Bagaimanakah peran IBI dalam melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bidang praktik mandiri?
3. Bagaimanakah bentuk pembinaan dan pengawasan dari IBI?
4. Bagaimana kendala yang dialami oleh IBI dalam melakukan pembinaan dan pengawasan?

(Ijin Praktik)

5. Bagaimanakah pelaksanaan registrasi dan perizinan bidan praktik mandiri di Kota Semarang?
 6. Apa saja persyaratan yang diperlukan dalam memperoleh SIPB untuk praktik mandiri?
 7. Bagaimanakah pendapat anda tentang perubahan SIB menjadi STR?
 8. Bagaimanakah prosedur untuk mengurus ijin Bidan Praktik Mandiri?
(Kewenangan Bidan)
(Kepmenkes No. 900/MENKES/SK/VII/2002)
- Pelaksanaan Kepmenkes No.900/MENKES/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan. Kewenangan bidan dalam Kepmenkes tersebut antara lain : pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan masyarakat.
9. Bagaimana pandangan anda mengenai pelaksanaan kewenangan bidan pada Kepmenkes No. 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan?
 10. Apakah Kepmenkes No.900/MENKES/SK/VII/2002 sudah sesuai dengan praktik bidan mandiri?

(Permenkes No. HK. 02.02/MENKES/149/I/2010)

Pelaksanaan Permenkes No.HK.02.02/MENKES/149/2010 tentang jjin dan penyelenggaraan praktik bidan. Kewenangan bidan dalam Permenkes tersebut antara lain : pelayanan kebidanan, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam Permenkes ini kewenangan bidan mulai untuk dibatasi.

11. Bagaimana pandangan anda mengenai pelaksanaan kewenangan bidan pada Permenkes No. HK. 02.02/MENKES/149/I/2010 tentang jjin dan penyelenggaraan praktik bidan?

12. Apakah Permenkes No. HK. 02.02/MENKES/149/I/2010 sudah sesuai dengan praktik bidan mandiri?

(Permenkes No.1464/MENKES/PER/I/2010)
Pelaksanaan Permenkes No.1464/MENKES/PER/I/2010 tentang jjin dan penyelenggaraan praktik bidan. Kewenangan bidan dalam Permenkes tersebut antara lain : pelayanan ibu, pelayanan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Dalam Permenkes ini bidan hanya dapat melakukan pelayanan imunisasi, dan keluarga berencana atas tugas pemerintah. Dan bidan hanya dapat memberikan konseling.

13. Bagaimana pandangan anda mengenai pelaksanaan kewenangan bidan pada Permenkes No. 1464/MENKES/PER/I/2010 tentang jjin dan penyelenggaraan praktik bidan?

14. Apakah bidan hanya boleh melakukan imunisasi dan pelayanan kontrasepsi seperti AKBK, AKDR, suntik KB dengan tugas pemerintah?
15. Apakah bidan praktik mandiri telah menggunakan Permenkes No. 1464/MENKES/PER/II/2010 tentang jin dan penyelenggaraan praktik bidan?
16. Bagaimanakah IBI melakukan sosialisasi terhadap Permenkes No. 1464/MENKES/PER/II/2010 tentang jin dan penyelenggaraan praktik bidan kepada bidan praktik mandiri?
17. Apakah menurut anda masih ada kelemahan dalam Permenkes No. 1464/MENKES/PER/II/2010 tentang jin dan penyelenggaraan praktik bidan dengan Kepmenkes No. 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan serta Permenkes No. HK.02.02/MENKES/149/II/2010 tentang jin dan penyelenggaraan praktik bidan ?
18. Apakah menurut anda dengan adanya Permenkes No. 1464/MENKES/PER/II/2010 tentang jin dan penyelenggaraan praktik bidan membatasi pelaksanaan pelayanan kebidanan?
19. Apakah tugas organisasi profesi IBI dalam tindak lanjut berlakunya Permenkes No. 1464/MENKES/PER/II/2010 tentang jin dan penyelenggaraan praktik bidan?

20. Apakah sudah ada pelaksanaan peningkatan mutu dan profesionalisme anggota IBI di Kota Semarang baik melalui pendidikan berkelanjutan maupun seminar dan pelatihan?



**KUESIONER
(DKK)**

A. Identitas Responden

1. Keterangan Wawancara

- a. Tanggal Pendataan :
- b. Petugas Pendataan :

2. Identitas Responden

- a. Nomor Responden :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Alamat :
- d. Umur : Th

**B. PERTANYAAN
(Pembinaan dan Pengawasan)**

- 1. Berapa jumlah Bidang Praktik Mandiri di Kota Semarang?
- 2. Bagaimana fungsi dari pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh dinas kesehatan terhadap Bidang Praktik Mandiri?
- 3. Apakah bidang praktik mandiri secara rutin melaporkan kegiatannya kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang?
- 4. Bagaimana kendala yang dialami oleh DKK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan?

5. Bagaimana koordinasi DKK dan IBI dalam melakukan pengawasan dan pembinaan?
 6. Apakah pernah ada kasus pelanggaran kewenangan oleh bidan dan dalam bentuk apa?
 7. Apakah ada pertemuan rutin antara IBI dan DKK untuk mengevaluasi pelayanan Bidan Praktik Mandiri?
 8. Bagaimana mekanisme pelaporan dari Bidan Praktik Mandiri kepada DKK tentang praktiknya?
- (Ijin)
9. Bagaimana proses registrasi dan perizinan bidan untuk praktik mandiri?
 10. Apakah persoalan yang sering dihadapi dalam registrasi dan perizinan bidan praktik mandiri?
 11. Bagaimana cara bidan untuk memperpanjang ijin praktik?
 12. Apa saja persyaratan yang diperlukan dalam proses perijinan? (Kewenangan Bidan)
- (Kepmenkes No. 900/MENKES/SK/VIII/2002)
- Pelaksanaan Kepmenkes No.900/MENKES/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan. Kewenangan bidan dalam Kepmenkes tersebut antara lain : pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan masyarakat.
13. Bagaimana pandangan anda mengenai pelaksanaan kewenangan bidan pada Kepmenkes No. 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan?

14. Apakah Kepmenkes No.900/MENKES/SK/VIII/2002 sudah sesuai dengan praktik bidan mandiri?

(Permenkes No. HK. 02.02/MENKES/149//2010)

Pelaksanaan Permenkes No.HK.02.02/MENKES/149/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan. Kewenangan bidan dalam Permenkes tersebut antara lain : pelayanan kebidanan, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam Permenkes ini kewenangan bidan mulai untuk dibatasi.

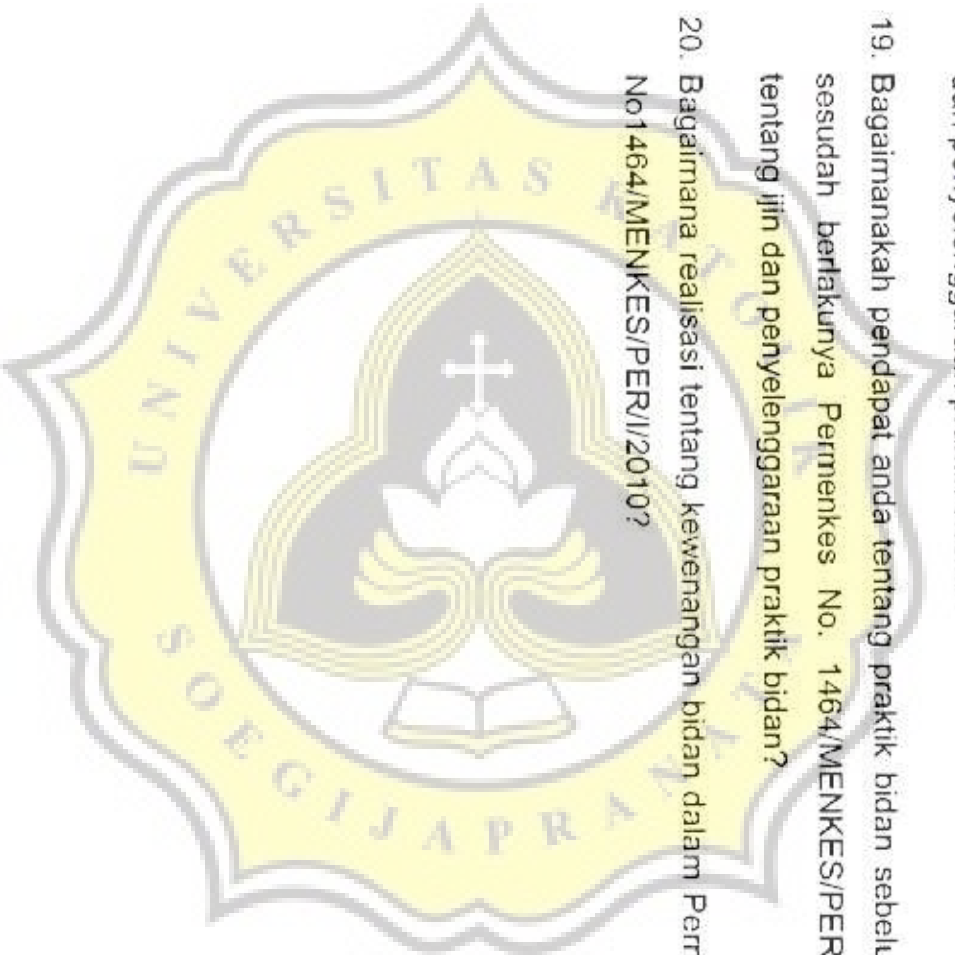
15. Bagaimana pandangan anda mengenai pelaksanaan kewenangan bidan pada Permenkes No. HK. 02.02/MENKES/149//2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan?

16. Apakah Kepmenkes No.900/MENKES/SK/VIII/2002 sudah sesuai dengan praktik bidan mandiri?

(Permenkes No.1464/MENKES/PER//2010)

Pelaksanaan Permenkes No.1464/MENKES/PER//2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan. Kewenangan bidan dalam Permenkes tersebut antara lain : pelayanan ibu, pelayanan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Dalam Permenkes ini bidan hanya dapat melakukan pelayanan imunisasi, dan keluarga berencana atas tugas pemerintah. Dan bidan hanya dapat memberikan konseling.

17. Bagaimana pandangan anda mengenai pelaksanaan kewenangan bidan pada Permenkes No. 1464/MENKES/PER/II/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan?
18. Apakah bidan banyak yang melanggar kewenangannya setelah berlakunya Permenkes No. 1464/MENKES/PER/II/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan?
19. Bagaimanakah pendapat anda tentang praktik bidan sebelum dan sesudah berlakunya Permenkes No. 1464/MENKES/PER/II/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan?
20. Bagaimana realisasi tentang kewenangan bidan dalam Permenkes No1464/MENKES/PER/II/2010?



Lampiran 4

TABEL HASIL REKAP BIDAN PRAKTIK MANDIRI

A. Jjin dan Persyaratan

Tabel 1

Data Pendidikan BPM		
Lulusan	Responden	
	n	%
SPK	1	4
DI	2	8
DIII	12	48
DIV	6	24
S1	1	4
S2	3	12
Total	25	100

Sumber : Data Primer yang diolah Tahun 2012

Tabel 2

Data Praktik BPM		
Tahun	Responden	
	n	%
1985-1989	2	8
1990-1994	8	32
1995-1999	13	52
2000-2004	1	4
2005-2009	1	4
Total	25	100

Sumber : Data Primer yang diolah Tahun 2012

Tabel 3
Data Lama Praktik BPM

Lama Praktik	Responden	
	n	%
1-5	1	4
6-10	1	4
11-15	9	36
16-20	8	32
21-25	5	20
26-30	1	4
Total	25	100

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012

Tabel 4
Data Pelayanan Kebidanan pada BPM

Pelayanan BPM	Responden	
	n	%
Hamil	25	100
Bersalin	25	100
Nifas	25	100
BBL	25	100
Imunisasi	25	100
KB	25	100
Kesehatan Reproduksi Wanita	25	100
Kesehatan Masyarakat	24	96

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012

Tabel 5

Data Persyaratan BPM

Persyaratan BPM	Responden	
	n	%
Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi	2	8
Fotocopy SIB yang masih berlaku dan dilegalisasi	23	92
Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik	25	100
Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik	25	100
Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3(tiga) lembar	25	100
Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab/kota yang ditunjuk	25	100
Rekomendasi dari organisasi profesi	25	100

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012

Tabel 6

Data Pelaksanaan Pengobatan Umum BPM

Pengobatan Umum	Responden	
	n	%
Ya	18	72
Tidak	7	28
Total	25	100

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012

Tabel 7

Data Perbaruan Jin BPM

Banyak (kall)	Responden	
	n	%
1	4	16
2	7	28
3	11	44
4	2	8
5	1	4
Total	25	100

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012

Tabel 8

Data Rekomendasi IBI

Rekomendasi IBI	Responden	
	n	%
Ya	25	100
Tidak	0	0
Total	25	100

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012

Tabel 9
Data Pengawasan IBI terhadap BPM

Pengawasan IBI	Responden	
	n	%
Ya	24	96
Tidak	1	4
Total	25	100

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012

Tabel 10
Data Peningkatan Pendidikan BPM

Peningkatan Pendidikan	Responden	
	n	%
Ya	25	100
Tidak	0	0
Total	25	100

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012

B. Kewenangan

1. Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan

Tabel 11

Data Kewenangan dan Pelaksanaan Praktik BPM		Responden	
Kewenangan dan Pelaksanaan Praktik Bidan	n		%
Sesuai	25		100
Tidak Sesuai	0		0
Total	25		100

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012

2. Permenkes Nomor HK.02.02/Menkes/149/2010 Tentang Jjin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Tabel 12

Data Kewenangan dan Pelaksanaan Praktik BPM		Responden	
Kewenangan dan Pelaksanaan Praktik Bidan	n		%
Sesuai	5		20
Tidak Sesuai	20		80
Total	25		100

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012

3. Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/1/2010 Tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

a. Kewenangan dan Pelaksanaan Praktik Bidan

Tabel 13

Data Kewenangan dan Pelaksanaan Praktik BPM

Kewenangan dan Pelaksanaan Praktik Bidan	Responden	
	n	%
Sesuai	10	40
Tidak Sesuai	15	60
Total	25	100

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012

b. Batasan Praktik Bidan Setelah Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/1/2010

Tabel 14

Data Batasan Bidan dalam BPM

Batasan Bidan	Responden	
	n	%
Dibatasi	22	88
Tidak Dibatasi	3	12
Total	25	100

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendaan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e mail:bumas@unika.ac.id



Nomor : 00140/B.7.3/MHK/II/2012

Lampiran : Proposal

Hal : Ijin Penelitian

02 Februari 2012

Kepada : Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
Jl Pandanaran 79
Semarang

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian Tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik
Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : FITRIANI NUR DAMAYANTI

N I M : 10.93.0017

Judul Tesis :


" PERBANDINGAN PELAKSANAAN KEMENANGAN BIDAN DALAM
PELAYANAN KEBIDANAN PADA BIDAN PRAKTIK MANDIRI (BPM)
MENURUT KEPMENKES NO.900/MENKES/SK/VI/2002, PERMENKES
NO.HK.02.02/MENKES/149/2010 DAN PERMENKES NO.
1464/MENKES/PER/X/2010 DI KOTA SEMARANG "

arsama ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin penelitian serta informasi ataupun
ata yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

asil penelitian dan wawancara tersebut sangat diperlukan dalam penyusunan Tesis, sebagai
arat kelulusan Program Studi Magister Hukum Kesehatan

simkian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Program Studi,


Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH

NPP.05814984006


PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415479 • 8445265
e-mail: humas@unika.ac.id



Nomor : 00140/B.7.3/MHK/II/2012

02 Februari 2012

Lampiran : Proposal
Hal : 1 : Ijin Penelitian

Kepada : Yth.
Ketua IBI Cabang Kota Semarang
Di Semarang

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian Tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik
Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FITRIANI NUR DAMAYANTI

N I M : 10.93.0017

Judul Tesis :

" PERBANDINGAN PELAKSANAAN KEWENANGAN BIDAN DALAM
PELAYANAN KEBIDAMAN PADA BIDAN PRAKTIK MANDIRI (BPM)
MENURUT KEPMENKES NO.900/HENKES/SK/II/2002, PERMENKES
NO.HK.02.02/MENKES/149/2010 DAN PERMENKES NO.
1464/MENKES/PERU/X/2010 DI KOTA SEMARANG "

Bersama ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin penelitian serta informasi ataupun
data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut .

Hasil penelitian dan wawancara tersebut sangat diperlukan dalam penyusunan Tesis, sebagai
syarat kelulusan Program Studi Magister Hukum Kesehatan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Program Studi,


Dr. Endang Waluyati Y., SH., MH

NPWP 06811984006



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Benda Dukur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: humas@unika.ac.id



Nomor : 00140/B.7.3/MHK/II/2012

02 Februari 2012

Lampiran : Proposal

Halaman : Ijin Penelitian

Kepada : Yth.

Bidan
Di
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian Tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FITRIANI NUR DAMAYANTI

NIM : 10.93.0017

Judul Tesis

" PERBANDINGAN PELAKSANAAN KEMENANGAN BIDAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN PADA BIDAN PRAKTIK MANDIRI (BPM) MENURUT KEPMENKES NO.900/MENKES/SK/V/2002, PERMENKES NO.HK.02.02/MENKES/149/2010 DAN PERMENKES NO. 1464/MENKES/PER/X/2010 DI KOTA SEMARANG "

bersama ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin penelitian serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Hasil penelitian dan wawancara tersebut sangat diperlukan dalam penyusunan Tesis, sebagai syarat kelulusan Program Studi Magister Hukum Kesehatan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Program Studi,

Dr. Endang Wahyati Y., SH., MH

029 3584 1982006

PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN



IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI) CABANG KOTA SEMARANG

Alamat Sekeloaal : Perum. KORPRI Semarang Baru Gg. V/ 44 C Semarang Telp. (024) 6723678
Alamat Kelua : Jl. Candi Kencana Raya G-3 Perum. Pasadana, Semarang
Telp. (024) 7607917, Hp. 081 2285 5134

omor
mpiran
erihal

11/IBI-KOT/SEK/II/2012

Semarang, 10 Februari 2012

Jjin Penelitian

Kepada

Yth. Bidan Praktik Mandiri

Kota Semarang

Di

SEMARANG

Berdasarkan surat dari Sekretaris Program Studi Program Pasca Sarjana
Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata, Nomor :
00140/B.7.3/MH/II/2012, tanggal 2 Februari 2012 perihal pada pokok surat,
bahwa nama tersebut dibawah sedang menyusun Tesis.

Nama : Fitriani Nur Damayanti

NIM : 10.93.0017

Status : Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata
Judul : "Perbandingan Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam
Pelayanan Kebidanan Pada Bidang Praktik Mandiri (BPM)


Menurut Kepmenkes No.900/Menkes/SK/VIII/2002, Permenkes
No.HK.02.02/Menkes/149/2010 dan Permenkes
1454/Menkes/Per/X/2012 Di Kota Semarang"

Sehubungan hal tersebut diatas, kami mohon bantuan Saudara untuk
memberikan informasi atau data yang diperlukan untuk kelengkapan penyusunan
tesis.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

PENGURUS IKATAN BIDAN INDONESIA



KOTA SEMARANG

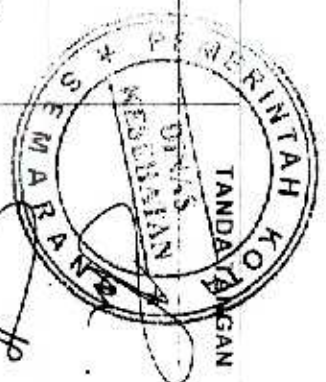
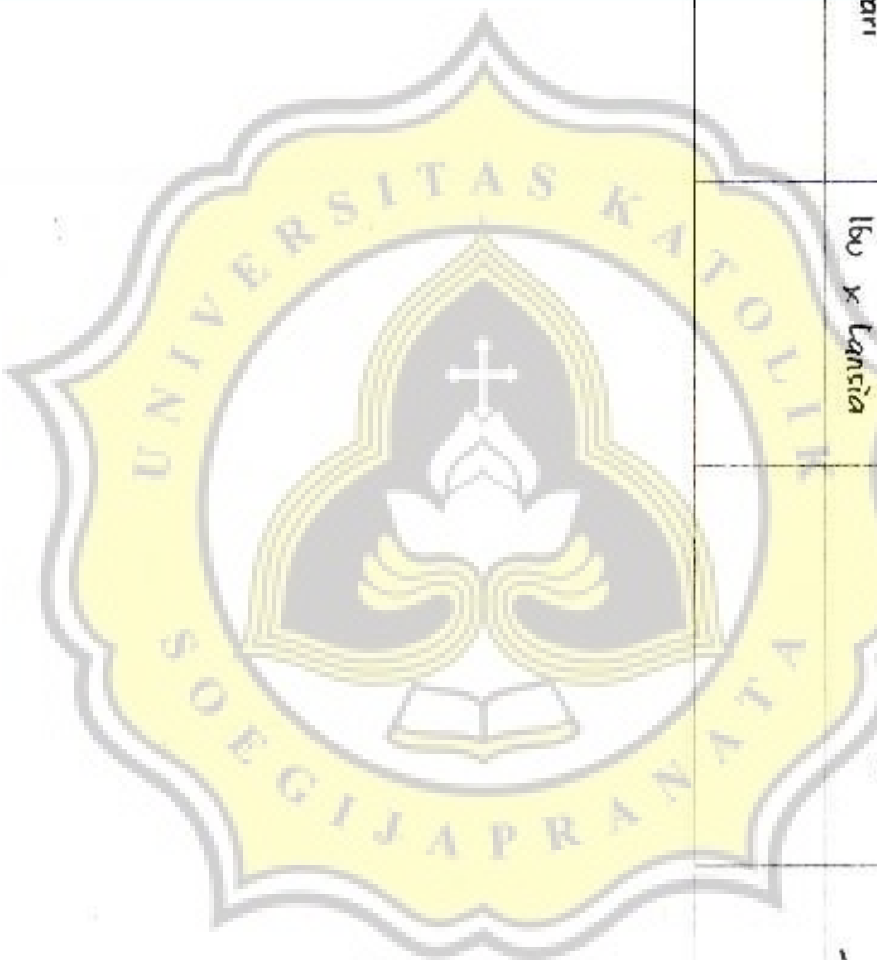


H. Ristiyah SST,
Ketua



Sekretaris

DAFTAR RESPONDEN
(DKK KOTA SEMARANG)

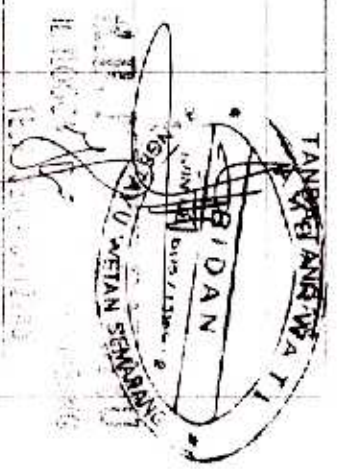
NAMA	BAGIAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
Heri mbom	6 PIC Yankes	DKK.	
S. Minasari	Sie. Kesehatan Ibu x Lancia	Dinkes Kota Sng	



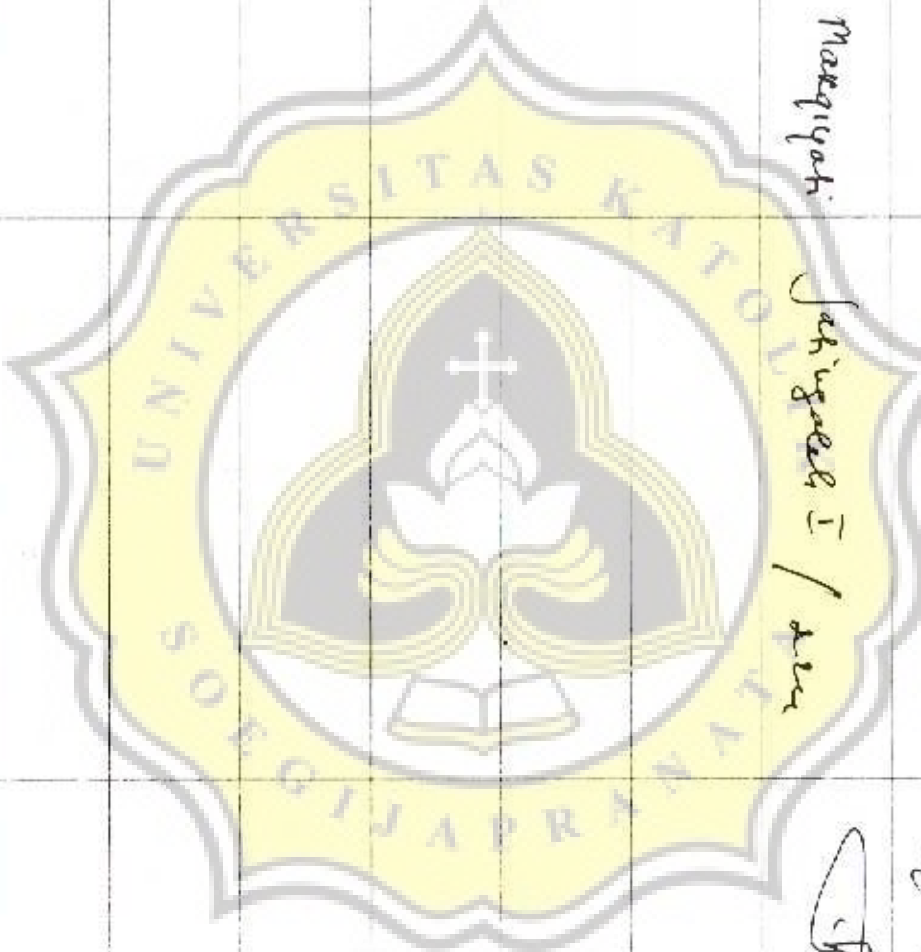
DAFTAR RESPONDEN
(IBI KOTA SEMARANG)

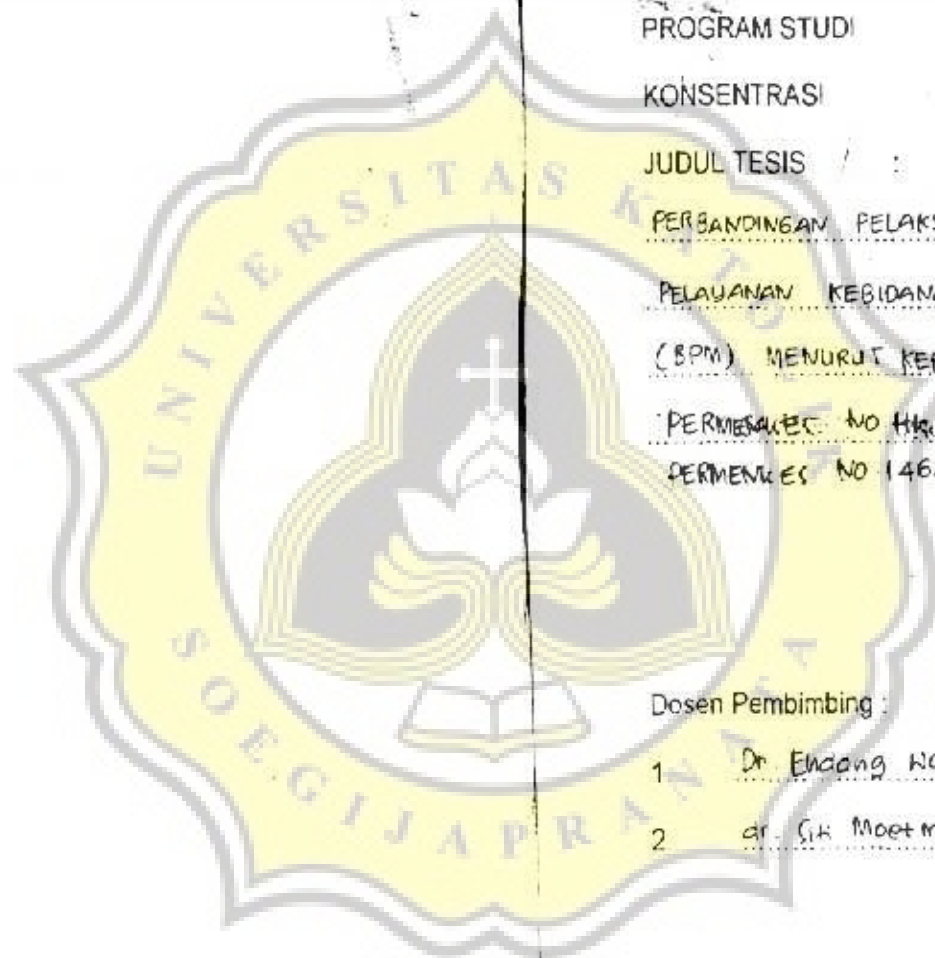
NAMA	BAGIAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
Ristiyah	Kelu IBI	Jl. Candi Lirisan C-5 Pasadena	 KORONGURUS C. 1 KORIBI, KOTA SEMARANG
Ngabekti	MK Kerya IBI	Jl. Mahyudagel Sela Tan. B. Ngalyon	 KORONGURUS C. 1 KORIBI, KOTA SEMARANG





C	NAMA	ALAMAT
	Ambarwati	Banyuwangi selatan 4405 RW05 Gemuk
	Tika Supriharni	Tlogomukti raya 1123
	Sri Gustini	Tlogosari Raya
	Sri Margiyati	Jatigedel I / desa





NAMA : FITRIANI NUR DAMAYANTI

NIM : 10.93.0017



PROGRAM STUDI : HUKUM




KONSENTRASI : HUKUM KESEHATAN

JUDUL TESIS :
PERBANDINGAN PELAKSANAAN KEWENANGAN BIDAN DALAM
PELAYANAN KEBIDANAN PADA BIDAN PRAKTIK MANDIRI
(BPM) MENURUT PERMENKES NO.900/MENKES/ISK/VIII/2002,
PERMENKES NO HK/03.P2/MENKES/149/2010 DAN
PERMENKES NO 1464/MENKES/PER/X/2010 DIKOTA SEMARANG

Dosen Pembimbing :




1. Dr. Endang Nuhuti U, SH, MH
2. dr. Sih Moetmainan Prihadi, SP.06(K)

No.	Tanggal	MATERI / BAB	Catatan / Koreksi	membimbing	Keterangan (Revisi / ACC)	Tanda Tangan	
						Pemb I	Pemb II
1.	2 Desember 2011	proposal	<ol style="list-style-type: none"> 1. nama kecabang 2. metode penelitian 3. jenis data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. latar belakang 2. rumusan masalah 3. jenis data 	Revisi		
2.	8 Desember 2011	proposal	<ol style="list-style-type: none"> 1. judul 2. rumusan masalah 3. penjabaran 4. metodologi penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. latar belakang 2. rumusan masalah 3. jenis data 	Revisi		

No.	Tanggal	MATERI / BAB	Catatan / Koreksi Pembimbing	Keterangan (Revisi / ACC)	Tanda Tangan	
					Pemb I	Pemb II
3.	12 Des 11.	Propose	komnetas → Revisi			
4.	19 Des '2011	proposal	Perhatikan - Redaksi kalimat & grammar - Metodologi yg has metodologi penelitian Haku - Diagram Questionaire	Revisi		
5.	25 Des 2011	Propose	Revisi ulap: - kerangka penun. - Def op. - design penelitian	Revisi.		
6.	2 Jan 2012	Propose	-	Acc.		

No.	Tanggal	MATERI / BAB	Catatan / Koreksi	Membimbing	Keterangan (Revisi / ACC)	Tanda Tangan	
						Pemb I	Pemb II
7	4 Jan 2012	Proposal	Revisi skema. - Perubahan metode logi		Revisi		
8	5 Jan 2012	proposal	acc		acc		
9	26 Jan 2012	Proposal	revisi tabel dan questionnaire		Revisi		
10	01 Feb 2012	proposal	acc pasca ujian proposal		acc.		
11	01 Feb 2012	Proposal	acc pasca ujian proposal		acc		

No.	Tanggal	MATERI / BAB	Catatan / Koreksi	Pembimbing	Keterangan (Revisi / ACC)	Tanda Tangan	
						Pemb I	Pemb II
12.	16/2012 /2	Bab I	Revisi bagian penulisan	Intematika	Revisi		
13.	22/2012 /2	Bab II	- Perbaikan tabel dan penulisan - kepatifan dan masalah S/mo - tambal perbaikan		Revisi		
14.	27/2012 /2	Bab II S/A 15	Revisi - Analisis dan perbandingan pedaki halamud	ptajun	Revisi		
15.	29/2012 /2	Bab III & IV	Revisi - Analisis dan tambal - lihat C/f		Revisi		

No.	Tanggal	MATERI / BAB	Catatan / Koreksi Pembimbing	Keterangan (Revisi / ACC)	Tanda Tangan	
					Pemb I	Pemb II
16.	7/12 /3	Seluruhnya	Revisi 1. Analisis Dipea tujan 2. perhatikan per analisis kesehatan	revisi		
17.	9/12 /3	Formulir.	acc	acc		
18.	12/12 /3	Bab 1 & 14	1 Revisi Alkalin 2 lengkapi dg data	revisi		
	13/12 /3	Seluruhnya	acc	acc	